BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA KERJA (RENJA) BADAN LITBANG TAHUN 2016

BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 050-011 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2016

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
Jl. Kramat Raya No. 132, Jakarta Pusat
bpp.kemendagri.go.id

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Renja Badan Litbang Kemendagri) merupakan dokumen perencanaan Badan Litbang untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat pokok-pokok arah kebijakan, target keluaran kegiatan beserta alokasi pendanaannya, yang digunakan sebagai pedoman bagi unit kerja lingkup Badan Litbang dalam melaksankan tugas dan fungsinya pada tahun anggaran tersebut. Selain itu, dokumen Renja ini juga digunakan sebagai dasar dalam mengukur pencapaian kinerja Badan Litbang.

Renja Badan Litbang Kemendagri TA.2016 disusun sebagai penjabaran atas Rencana Strategis (Renstra) Badan Litbang Kemendagri Tahun 2015-2019 untuk Tahun Anggaran 2016 dan tindak lanjut atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2016.

Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak agar tujuan dan sasaran yang diharapkan serta peningkatan kinerja instansi dapat tercapai. Semoga Tuhan Y.M.E senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya dalam menjalankan pengabdian kepada bangsa dan negara.

Jakarta, Januari 2016

Plt. KEPALA BADAN

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DOMOE ABDIE

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar isi ii

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-011 Tahun 2016
Tentang Rencana Kerja Badan Litbang Kemendagri TA. 2016 iii

I. PENDAHULUAN 1

II. POKOK-POKOK CAPAIAN TAHUN 2015 2

III. RENCANA KERJA BADAN LITBANG KEMENDAGRI TAHUN 2016 5

3.1 Pokok-pokok Kebijakan Rencana Kerja Badan Litbang Kemendagri Tahun 2016 5

3.2 Alokasi Anggaran Tahun 2016 16

IV. PENUTUP 17

Lampiran Matrik Renja Badan Litbang TA.2016 vi

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR: 050-011 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2016

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016, maka perlu disusun Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2016 Nomor SP DIPA-010.11-0/2016 tanggal 07 Desember 2015

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016.

KEDUA : Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan dijabarkan lebih rinci dalam dokumen RKA-KL Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016.

KEEMPAT : Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir tanggal 31 Desember 2016.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2016

a.n MENTERI DALAM NEGERI,
Plt. KEPALA BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN,

Drs. DOMOE ABDIE, M.Si

Tembusan Yth :
1. Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV; dan
6. Pejabat Eselon II di Lingkungan BPP Kemendagri.

I. PENDAHULUAN

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, diamanatkan kepada Kementerian/Lembaga untuk menyusun Renja K/L sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada Renstra K/L dan mengacu kepada RKP tahunan.

Sebagai pelaksanaan ketentuan tersebut, untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Tahun 2016 di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, disusun Renja Tahun 2016 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Penelitian dan Pengembangan dalam menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;
b. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;
c. Pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri;
d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;
e. Pelaksanaan fasilitasi inovasi daerah;
f. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah;
g. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan; dan
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Untuk menjalankan fungsi diatas, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri didukung oleh 5 (lima) Unit Eselon II, yaitu: Pusat Penelitian dan Pengembangan Otonomi Daerah, Politik, dan Pemerintahan Umum, Pusat Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil, Pusat Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah dan Aparatur, Pusat Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri.

II. POKOK-POKOK CAPAIAN TAHUN 2015

Sebagai gambaran kondisi umum pada awal pelaksanaan Renja Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016, diuraikan pokok-pokok capaian Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 yang dikelompokkan ke dalam kegiatan-kegiatan, sebagai berikut:

1. Penelitian dan Pengembangan Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum, dengan pokok-pokok capaian kinerja tahun 2015 antara lain:
   a. Tersusunnya Rekomendasi Hasil Kajian Strategis tentang Implementasi E-Voting dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2019.
   b. Tersusunnya Rekomendasi Hasil Kajian Strategis tentang Implementasi Kelembagaan Badan Penelitian dan Pengembangan Di Daerah.
   c. Tersusunnya Rekomendasi Hasil Kajian Strategis tentang Pembentukan Instansi Vertikal Pemerintahan Umum Daerah.
   d. Tersusunnya Rekomendasi Hasil Kajian Aktual tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di Kabupaten Banyuasin dengan Teknologi E-Voting.
   e. Tersusunnya Rekomendasi Hasil Kajian Aktual tentang Partisipasi dan Netralisasi Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung.
   f. Tersusunnya Rekomendasi Hasil Kajian Aktual tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Agama & Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 Tahun 2006 (Kajian Terhadap Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama).
   g. Tersusunnya 11 (sebelas) Rekomendasi Hasil Diskusi Aktual (FDA).

h. Terlaksananya Pembinaan Kelitbangan (Fasilitasi, Asistensi, Koordinasi, NSPK) Pusat dan Daerah Bidang Otonomi Daerah, Bidang Politik, dan Bidang Pemerintahan Umum.

2. Penelitian dan Pengembangan Administrasi Wilayah, Pemerintahan Desa dan Kependudukan, dengan pokok-pokok capaian kinerja tahun 2015 antara lain:
   a. Tersusunnya Rekomendasi Hasil Kajian Strategis tentang Keberadaan Sekretariat Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat pada Pemerintah Provinsi.
   b. Tersusunnya Rekomendasi Hasil Kajian Strategis tentang Perspektif Kewenangan Desa dan Desa Adat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
   c. Tersusunnya Rekomendasi Hasil Kajian Strategis tentang Implementasi Pencacatan Kelahiran dan Kematian.
   d. Tersusunnya Rekomendasi Hasil Kajian Aktual tentang Implementasi Pengelolaan Keuangan Dana Desa.
   e. Tersusunnya Rekomendasi Hasil Kajian Aktual tentang Implementasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan pada.
   f. Tersusunnya 12 (dua belas) Rekomendasi Hasil Diskusi Aktual (FDA).
   g. Terlaksananya Pembinaan Kelitbangan (Fasilitasi, Asistensi, Koordinasi, NSPK) Pusat dan Daerah Bidang Administrasi Kewilayahan, Bidang Pemerintahan Desa, dan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

3. Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dengan pokok-pokok capaian kinerja tahun 2015 antara lain:
   a. Tersusunnya Rekomendasi Hasil Kajian Strategis tentang Implementasi Pengalihan P3D Sesuai dengan Surat Edaran Mendagri tentang Penyelenggaraan Urusan Sejak Ditetapkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
   b. Tersusunnya Rekomendasi Hasil Kajian Strategis tentang Perbandingan Biaya Penyelenggaraan Pilkada Serentak Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota Tahun 2015 dengan Sumber Dana APBD.
   c. Tersusunnya Rekomendasi Hasil Kajian Strategis tentang Dampak Pengembangan Kawasan Strategis Terhadap Perekonomian (Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Cepat Tumbuh di Daerah).

d. Tersusunnya Rekomendasi Hasil Kajian Aktual tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
e. Tersusunnya Rekomendasi Hasil Kajian Aktual tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai Elemen Pokok Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
f. Tersusunnya Rekomendasi Hasil Kajian Aktual tentang Hak Protokoler dan Hak Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota.
g. Tersusunnya 12 (dua belas) Rekomendasi Hasil Diskusi Aktual (FDA).
h. Terlaksananya Pembinaan Kelitbangan (Fasilitasi, Asistensi, Koordinasi, NSPK) Pusat dan Daerah Bidang Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, Bidang Keuangan Daerah, dan Bidang Ekonomi Daerah.

4. Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah dan Aparatur, dengan pokok-pokok capaian kinerja tahun 2015 antara lain:
   a. Tersusunnya Rekomendasi Hasil Kajian Strategis tentang Bentuk Penghargaan dan Insentif kepada Daerah yang Melakukan Inovasi.
   b. Tersusunnya Rekomendasi Hasil Kajian Taktis tentang Peran Kelembagaan Litbang Daerah Dalam Mendukung Inovasi Daerah.
   c. Tersusunnya Rekomendasi Hasil Kajian Aktual tentang Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Menyusun Road Map SIDa.
   d. Tersusunnya Rekomendasi Hasil Kajian Aktual tentang Manajemen Pengembangan Sumber Daya Aparatur Pengelola Inovasi Daerah.
   e. Tersusunnya Rekomendasi Hasil Kajian Aktual tentang Kebijakan Pengembangan Kapasitas SDM Kelitbangan dalam Mendukung Inovasi Daerah.
   f. Tersusunnya Rekomendasi Hasil Kajian Aktual tentang Identifikasi hasil Kelembagaan yang menangani Inovasi Daerah.
   g. Tersusunnya Rekomendasi Hasil Perekayasaan tentang Peraturan bersama Menristek dan Mendagri No. 03 dan 36 tahun 2012 tentang SIDa menjadi Draft PP tentang Inovasi Daerah.
   h. Terfasilitasinya 5 Provinsi yang telah melaksanakan Inovasi Daerah (Sulsel, Jabar, Jateng, Jatim, Bali dan Kaltim).

i. Terlaksananya Pembinaan Kelitbangan (Fasilitasi, Asistensi, Koordinasi, NSPK) Pusat dan Daerah Bidang Pengembangan Inovasi, Bidang Sumber Daya Manusia, dan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.

5. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, dengan pokok-pokok capaian kinerja tahun 2015 antara lain:
   a. Terwujudnya Akuntabilitas penyusunan Rencana Program dan Anggaran Badan Litbang Kemendagri.
   b. Terlaksananya rintisan kerjasama kelitbangan dengan lembaga nasional dan internasional.
   c. Tersusunnya satu peraturan menteri tentang pengelolaan kelitbangan.
   d. Tersusunnya laporan kinerja tahunan dan laporan hasil-hasil kelitbangan.
   e. Terwujudnya Akuntabilitas pengelolaan keuangan Badan Litbang Kemendagri.
   f. Terselenggaranya operasional perkantoran, pelayanan rumah tangga, tata usaha pimpinan, pengelolaan perpustakaan, dokumentas dan publikasi.
   g. Terlaksananya penyelesaian pembangunan gedung kantor Badan Litbang (lanjutan).
   h. Terlaksananya pengelolaan kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, sistem prosedur dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.

III. RENCANA KERJA BADAN LITBANG KEMENDAGRI TAHUN 2016

3.1 Pokok-Pokok Kebijakan Rencana Kerja Badan Litbang Kemendagri Tahun 2016

Dalam rangka mendukung agenda Nawa Cita dan kebijakan prioritas Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 sesuai koridor kebijakan strategis yang menjadi prioritas Kementerian Dalam Negeri tahun 2016, Badan Penelitian dan Pengembangan telah menetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Program pada tahun 2016, yaitu:

1. **Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kemendagri,** dengan target 70% hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai masukan kebijakan Kemendagri;

2. **Jumlah pemerintah daerah yang difasilitasi dalam melaksanakan inovasi daerah,** dengan target 34 Provinsi yang difasilitasi dalam melaksanakan inovasi daerah; dan
3. **Jumlah Kebijakan Inovasi Daerah,** dengan target 1 (satu) Peraturan Pemerintah Tentang Inovasi Daerah.

Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan lingkup Kemendagri yang didukung oleh hasil penelitian dan pengembangan serta pemanfaatan hasil penelitian sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan.

Di samping itu, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri juga diharapkan mampu menjadi poros inovasi daerah melalui kegiatan pembinaan pelaksanaan inovasi daerah dan pembentukan regulasi tentang inovasi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Adapun pagu anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016 adalah sebesar Rp.55.904.831.000,- (lima puluh lima miliar sembilan ratus empat juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk pencapaian target Rencana Kerja Tahun 2016, Badan Penelitian dan Pengembangan melaksanakan 5 (lima) Kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum

Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, dan evaluasi penelitian dan pengembangan terkait otonomi daerah, politik dan pemerintahan umum.

Target kegiatan Penelitian dan Pengembangan Otonomi Daerah, Politik, dan Pemerintahan Umum sebanyak 8 (delapan) rekomendasi hasil kelitbangan, 12 (dua belas) rekomendasi hasil diskusi aktual, dan 4 laporan pembinaan kelitbangan, dengan pagu anggaran kegiatan sebesar Rp.3.942.736.000,- (tiga miliar sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah), yang dapat diukur dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berikut:

a. Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan hasil kegiatan kelitbangan (Penelitian, Pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, dan pengoperasian) Puslitbang Otonomi Daerah, Politik, dan Pemerintahan Umum yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan, yang memiliki target 8 (delapan) rekomendasi

hasil kelitbangan dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.900.000.000,- (dua miliar sembilan ratus juta rupiah). Indikator ini memiliki 2 (dua) komponen sebagai berikut:

- Pelaksanaan kegiatan kelitbangan lingkup Otonomi Daerah, Politik, dan Pemerintahan Umum, yang memiliki target 4 (empat) rekomendasi dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah); dan
- Pengkajian Aktual dan Kajian Kompetitif, yang memiliki target 4 (empat) rekomendasi dengan pagu anggaran sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).

b. Jumlah Hasil Rekomendasi Forum Diskusi Aktual (FDA) Otonomi Daerah, Politik, dan Pemerintahan Umum yang direkomendasikan untuk ditindaklanjuti, yang memiliki target 12 (dua belas) rekomendasi hasil Diskusi Aktual dengan pagu anggaran sebesar Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah). Indikator ini memiliki 3 (tiga) komponen sebagai berikut:

- Forum Diskusi Aktual Bidang Otonomi Daerah, yang memiliki target 4 (empat) rekomendasi dengan pagu anggaran sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Forum Diskusi Aktual Bidang Politik, yang memiliki target 4 (empat) rekomendasi dengan pagu anggaran sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah); dan
- Forum Diskusi Aktual Bidang Pemerintahan Umum, yang memiliki target 4 (empat) rekomendasi dengan pagu anggaran sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

c. Jumlah Pembinaan kelitbangan (asistensi, koordinasi, fasilitasi, NSPK kelitbangan, peningkatan kapasitas, monitoring dan evaluasi) Pusat dan Daerah Puslitbang Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum, yang memliki target 4 (empat) laporan dengan pagu anggaran sebesar Rp.502.736.000,- (lima ratus dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Indikator ini memiliki 2 (dua) komponen sebagai berikut:

- Fasilitasi Pengendali Mutu Kelitbangan, yang memiliki target 1 (satu) laporan dengan pagu anggaran sebesar Rp.322.736.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah); dan

- Fasilitasi Penyusunan dan Pelaksanaan Program dan Anggaran Kelitbangan Lingkup Otonomi Daerah, Politik, dan Pemerintahan Umum, yang memiliki target 3 (tiga) laporan dengan pagu anggaran sebesar Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah).

2. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil

Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, dan evaluasi penelitian dan pengembangan terkait administrasi kewilayahan, pemerintahan desa, kependudukan, dan pencatatan sipil.

Target kegiatan Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil sebanyak 8 (delapan) rekomendasi hasil kelitbangan, 12 (dua belas) rekomendasi hasil diskusi aktual, dan 4 laporan pembinaan kelitbangan, dengan pagu anggaran kegiatan sebesar Rp.3.942.736.000,- (tiga miliar sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah), yang dapat diukur dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berikut:

a. Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan hasil kegiatan kelitbangan (Penelitian, Pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, dan pengoperasian) Puslitbang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan, yang memiliki target 8 (delapan) rekomendasi hasil kelitbangan dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.900.000.000,- (dua miliar sembilan ratus juta rupiah). Indikator ini memiliki 2 (dua) komponen sebagai berikut:
   - Pelaksanaan kegiatan kelitbangan lingkup Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil, yang memiliki target 4 (empat) rekomendasi dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah); dan
   - Pengkajian Aktual dan Kajian Kompetitif, yang memiliki target 4 (empat) rekomendasi dengan pagu anggaran sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).

b. Jumlah Hasil Rekomendasi Forum Diskusi Aktual (FDA) Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil yang

direkomendasikan untuk ditindaklanjuti, yang memiliki target 12 (dua belas) rekomendasi hasil Diskusi Aktual dengan pagu anggaran sebesar Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah). Indikator ini memiliki 3 (tiga) komponen sebagai berikut:

- Forum Diskusi Aktual Bidang Administrasi Kewilayahan, yang memiliki target 4 (empat) rekomendasi dengan pagu anggaran sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Forum Diskusi Aktual Bidang Pemerintahan Desa, yang memiliki target 4 (empat) rekomendasi dengan pagu anggaran sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah); dan
- Forum Diskusi Aktual Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang memiliki target 4 (empat) rekomendasi dengan pagu anggaran sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

c. Jumlah Pembinaan kelitbangan (asistensi, koordinasi, fasilitasi, NSPK kelitbangan, peningkatan kapasitas, monitoring dan evaluasi) Pusat dan Daerah Puslitbang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil, yang memliki target 4 (empat) laporan dengan pagu anggaran sebesar Rp.502.736.000,- (lima ratus dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Indikator ini memiliki 2 (dua) komponen sebagai berikut:

- Fasilitasi Pengendali Mutu Kelitbangan, yang memiliki target 1 (satu) laporan dengan pagu anggaran sebesar Rp.322.736.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah); dan
- Fasiilitasi Penyusunan dan Pelaksanaan Program dan Anggaran Kelitbangan Lingkup Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil, yang memiliki target 3 (tiga) laporan dengan pagu anggaran sebesar Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah).

3. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, dan evaluasi penelitian dan pengembangan terkait pembangunan dan keuangan daerah.

Target kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebanyak 8 (delapan) rekomendasi hasil kelitbangan, 12 (dua belas) rekomendasi hasil diskusi aktual, dan 4 laporan pembinaan kelitbangan, dengan pagu anggaran kegiatan sebesar Rp.3.942.736.000,- (tiga miliar sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah), yang dapat diukur dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berikut:

a. Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan hasil kegiatan kelitbangan (Penelitian, Pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, dan pengoperasian) Puslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan, yang memiliki target 8 (delapan) rekomendasi hasil kelitbangan dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.900.000.000,- (dua miliar sembilan ratus juta rupiah). Indikator ini memiliki 2 (dua) komponen sebagai berikut:
   - Pelaksanaan kegiatan kelitbangan lingkup Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang memiliki target 4 (empat) rekomendasi dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah); dan
   - Pengkajian Aktual dan Kajian Kompetitif, yang memiliki target 4 (empat) rekomendasi dengan pagu anggaran sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).

b. Jumlah Hasil Rekomendasi Forum Diskusi Aktual (FDA) Pembangunan dan Keuangan Daerah yang direkomendasikan untuk ditindaklanjuti, yang memiliki target 12 (dua belas) rekomendasi hasil Diskusi Aktual dengan pagu anggaran sebesar Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah). Indikator ini memiliki 3 (tiga) komponen sebagai berikut:
   - Forum Diskusi Aktual Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, yang memiliki target 4 (empat) rekomendasi dengan pagu anggaran sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
   - Forum Diskusi Aktual Bidang Keuangan Daerah, yang memiliki target 4 (empat) rekomendasi dengan pagu anggaran sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah); dan

- Forum Diskusi Aktual Bidang Ekonomi Daerah, yang memiliki target 4 (empat) rekomendasi dengan pagu anggaran sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

c. Jumlah Pembinaan kelitbangan (asistensi, koordinasi, fasilitasi, NSPK kelitbangan, peningkatan kapasitas, monitoring dan evaluasi) Pusat dan Daerah Puslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang memliki target 4 (empat) laporan dengan pagu anggaran sebesar Rp.502.736.000,- (lima ratus dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Indikator ini memiliki 2 (dua) komponen sebagai berikut:

- Fasilitasi Pengendali Mutu Kelitbangan, yang memiliki target 1 (satu) laporan dengan pagu anggaran sebesar Rp.322.736.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah); dan
- Fasiilitasi Penyusunan dan Pelaksanaan Program dan Anggaran Kelitbangan Lingkup Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang memiliki target 3 (tiga) laporan dengan pagu anggaran sebesar Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah).

4. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah dan Aparatur

Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, dan evaluasi penelitian dan pengembangan terkait inovasi daerah dan aparatur.

Target kegiatan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah dan Aparatur sebanyak 8 (delapan) rekomendasi hasil kelitbangan, 34 Provinsi yang memperoleh pembinaan pelaksanaan inovasi daerah, 1 (satu) Peraturan Pemerintah, dan 4 laporan pembinaan kelitbangan, dengan pagu anggaran kegiatan sebesar Rp.4.263.164.000,- (empat miliar dua ratus enam puluh tiga juta seratus enam puluh empat ribu rupiah), yang dapat diukur dari 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berikut:

a. Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan hasil kegiatan kelitbangan (Penelitian, Pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, dan pengoperasian) Puslitbang Inovasi Daerah dan Aparatur yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan, yang memiliki target 8 (delapan) rekomendasi hasil kelitbangan dengan pagu

anggaran sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Indikator ini memiliki 2 (dua) komponen sebagai berikut:

- Pelaksanaan kegiatan kelitbangan lingkup Inovasi Daerah dan Aparatur, yang memiliki target 4 (empat) rekomendasi dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah); dan
- Pengkajian Aktual dan Kajian Kompetitif, yang memiliki target 4 (empat) rekomendasi dengan pagu anggaran sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).

b. Jumlah daerah (provinsi/kabupaten/kota) yang memperoleh pembinaan pelaksanaan inovasi daerah, yang memiliki target 34 (tiga puluh empat) daerah provinsi dengan pagu anggaran Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah). Indikator ini memiliki 2 (dua) komponen sebagai berikut:

- Pembinaan Inovasi Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
- Penilaian Inovasi Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

c. Jumlah Kebijakan Inovasi Daerah, yang memiliki target 1 (satu) Peraturan Pemerintah tentang Inovasi Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Indikator ini memiliki 1 (satu) komponen sebagai berikut:

- Peraturan Pemerintah tentang Inovasi Daerah, sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

d. Jumlah Pembinaan kelitbangan (asistensi, koordinasi, fasilitasi, NSPK kelitbangan, peningkatan kapasitas, monitoring dan evaluasi) Pusat dan Daerah Puslitbang Inovasi Daerah dan Aparatur, yang memliki target 4 (empat) laporan dengan pagu anggaran sebesar Rp.813.164.000,- (delapan ratus tiga belas juta seratus enam puluh empat ribu rupiah). Indikator ini memiliki 2 (dua) komponen sebagai berikut:

- Fasilitasi Pengendali Mutu Kelitbangan, yang memiliki target 1 (satu) laporan dengan pagu anggaran sebesar Rp.633.164.000,- (enam ratus tiga puluh tiga juta seratus enam puluh empat ribu rupiah); dan
- Fasiilitasi Penyusunan dan Pelaksanaan Program dan Anggaran Kelitbangan Lingkup Inovasi Daerah dan Aparatur, yang memiliki target 3

(tiga) laporan dengan pagu anggaran sebesar Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah).

5. **Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan**

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi manajemen dan administrasi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan, meliputi aspek perencanaan, monitoring dan evaluasi, pembinaan personil dan umum, dokumentasi dan informasi, administrasi kerjasama dan peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, dokumentasi dan informasi, pembinaan pejabat fungsional peneliti, serta anggaran, perbendaharaan dan verifikasi.

Target kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan sebanyak 3 (tiga) dokumen, 1 (satu) peraturan, 44 (empat puluh empat) laporan, 110 (seratus sepuluh) unit, dan 12 (dua belas) bulan layanan dengan pagu anggaran sebesar Rp.39.813.459.000,- (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus tiga belas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), yang dapat diukur dari 6 (enam) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berikut:.

a. Prosentase Penyelesaian dokumen Perencanaan dan Anggaran, Pengelolaan Data dan Evaluasi Kinerja serta Kerjasama Kelitbangan, Hukum dan Perundang-Undangan, yang memiliki target 3 (tiga) dokumen, 1 (satu) peraturan pemerintah, dan 8 (delapan) laporan dengan pagu anggaran sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah. Indikator ini memiliki 6 (enam) komponen sebagai berikut:
   - Perencanaan Program dan Anggaran, yang memiliki target 2 (dua) dokumen dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah)
   - Review Rencana Strategis BPP Tahun 2015-2019, yang memiliki target 1 (satu) dokumen dengan pagu anggaran sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);
   - Fasilitasi dan Penyusunan Produk Hukum dan Perundang-Undangan Bidang Kelitbangan, yang memiliki target 1 (satu) peraturan dengan pagu anggaran sebesar Rp.445.000.000,- (empat ratus empat puluh lima

juta rupiah);

- Fasilitasi Kerjasama Kelitbangan, yang memiliki target 1 (satu) laporan dengan pagu anggaran sebesar Rp.695.000.000,- (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- Monitoring dan Evaluasi Program, Kegiatan dan Anggaran BPP, yang memiliki target 5 (lima) laporan dengan pagu anggaran sebesar Rp.730.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah); dan
- Layanan Data, Pengelolaan Lab Data, dan Website BPP, yang memiliki target 2 (dua) laporan dengan pagu anggaran sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

b. Prosentase Pelayanan Adminitrasi Ketatausahaan Pimpinan, Kerumahtanggaan dan Perlengkapan, serta Pengelolaan Perpustakaan, Informasi dan Dokumentasi, yang memiliki 11 (sebelas) laporan dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.925.000.000,- (dua miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah). Indikator ini memiliki 3 (tiga) komponen sebagai berikut:

- Pelayanan Administrasi Ketatausahaan Pimpinan, yang memiliki target 3 (tiga) laporan dengan pagu anggaran sebesar Rp.440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah);
- Pelayanan Administrasi Kerumahtanggaan dan Perlengkapan, yang memiliki target 4 (empat) laporan dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.040.000.000,- (satu miliar empat puluh juta rupiah); dan
- Pelayanan Perpustakaan, Informasi, Publikasi dan Dokumentasi Kelitbangan yang memiliki target 4 (empat) laporan dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.445.000.000,- (satu miliar empat ratus empat puluh lima juta rupiah).

c. Prosentase Penyelesaian Administrasi Verifikasi, Perbendaharaan, Akuntansi, dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu, yang memiliki target 8 (delapan) laporan dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.858.000.000,- (satu miliar delapan ratus lima puluh delapan juta rupiah). Indikator ini memiliki 3 (tiga) komponen sebagai berikut:

- Pelayanan dan Pembinaan Verifikasi Keuangan BPP Kemendagri TA 2015, yang memiliki target 2 (dua) laporan dengan pagu anggaran sebesar

Rp.610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah);

- Pelayanan dan Pembinaan Perbendaharaan, yang memiliki target 2 (dua) laporan dengan pagu anggaran sebesar Rp.575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah); dan
- Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BPP, yang memiliki target 4 (empat) laporan dengan pagu anggaran sebesar Rp.673.000.000,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah).

d. Prosentase Penyelesaian Pembinaan Jabatan Fungsional, Kepegawaian dan Sistem Prosedur dan Evaluasi Kinerja ASN, yang memiliki target 17 (tujuh belas) laporan dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.924.000.000,- (satu miliar sembilan ratus dua puluh empat juta rupiah). Indikator ini memiliki 4 (empat) komponen sebagai berikut:

- Layanan Akreditasi, Pembinaan, dan Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional, yang memiliki target 4 (empat) laporan dengan pagu anggaran sebesar Rp.455.000.000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah);
- Layanan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian, yang memiliki target 6 (enam) laporan dengan pagu anggaran sebesar Rp.469.000.000,- (empat ratus enam puluh sembilan juta rupiah);
- Fasilitasi Penerapan Sistem Prosedur dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPP Kemendagri, yang memiliki target 6 (enam) laporan dengan pagu anggaran sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah); dan
- Rapat Koordinasi Nasional Litbang Tahun 2016, yang memiliki target 1 (satu) laporan dengan pagu anggaran sebesar Rp.725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).

e. Prosentase Penyelesaian Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran gaji, Operasional dan Pemerliharaan Perkantoran serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu, yang memiliki target 12 (dua belas) bulan layanan dengan pagu anggaran sebesar Rp.28.095.866.000,- (dua puluh delapan miliar sembilan puluh lima juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah). Indikator ini memiliki 2 komponen sebagai berikut:

- Pembayaran gaji dan tunjangan, yang memiliki target 12 (dua belas)

bulan layanan dengan pagu anggaran sebesar Rp.21.257.667.000,- (dua puluh satu miliar dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah); dan

- Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran, yang memiliki target 12 (dua belas) layanan dengan pagu anggaran sebesar Rp.6.838.199.000,- (enam miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

f. Prosentase sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan yang memiliki target 110 (seratus sepuluh) unit dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.510.593.000,- (satu miliar lima ratus sepuluh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah). Indikator ini memiliki 2 komponen sebagai berikut:

- Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi, yang memiliki target 10 (sepuluh) unit dengan pagu anggaran sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah); dan
- Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran, yang memiliki target 100 (seratus) unit dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.160.593.000,- (satu miliar seratus enam puluh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

3.2 Alokasi Anggaran Tahun 2016

Selanjutnya, berdasarkan Surat Menteri Keuangan No.S-868/ MK.02/2015 tanggal 30 Oktober 2015 perihal Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2016, Alokasi Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri adalah sebesar Rp. 55.904.831.000,- dengan komposisi sebagai berikut:

1. Pagu per Sumber Dana

   Rupiah Murni sebesar Rp. 55.904.831.000,-;

2. Pagu per Jenis Belanja

   a. Belanja Operasional sebesar Rp.28.041.272.000,-, dengan rincian:

      1) Belanja Pegawai sebesar Rp.21.984.761.000,-;
      2) Belanja Operasional Perkantoran sebesar Rp.6.056.511.000,-; dan

   b. Belanja Non Operasional, sebesar Rp.27.863.559.000,-, dengan rincian:

      1) Belanja Barang sebesar Rp.26.036.916.000,-; dan
      2) Belanja Modal sebesar Rp.1.826.643.000,-

3. Pagu per Kegiatan

No.	Program / Kegiatan	Pagu (Rp)
1	*2*	*3*
Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri		**55.904.831.000**
1	Penelitian dan Pengembangan Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum	3.942.736.000
2	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.942.736.000
3	Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah	3.942.736.000
4	Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah dan Aparatur	4.263.164.000
5	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang Kemendagri	39.813.459.000

Komposisi Pagu Alokasi Anggaran Program Penelitian dan Pengembangan Kemendagri TA.2016 tersebut lebih lanjut diuraikan secara rinci dalam Matriks Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran, beserta target capaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri TA 2016 (Lampiran II).

IV. PENUTUP

Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016 merupakan acuan dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran tahun 2016 pada Satuan Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri. Dalam pelaksanaan Rencana Kerja ini agar mempedomani prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)*, serta melaporkan pencapaiannya secara periodik dan berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a.n MENTERI DALAM NEGERI,
Plt. KEPALA BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN,

DOMOE ABDIE

MATRIK RENCANA KERJA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TAHUN ANGGARAN 2016

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN		OUTCOME/OUTPUT/ TARGET/SASARAN	NON OPERASIONAL					TOTAL
				RUPIAH MURNI		PHLN		PNBP	
				PUSAT	DAERAH	PUSAT	DAERAH		
1	2		3	5	6	7	8	9	10
010.11	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI. INDIKATOR/KOMPONEN		Meningkatnya kualitas hasil kelitbangan Kemendagri sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan, serta terfasilitasinya pelaksanaan inovasi daerah	27,808,965	-				27,808,965
	1.	Persentase hasil Kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kemendagri	70%						
	2.	Jumlah pemerintah daerah yang difasilitasi dalam melaksanakan inovasi daerah	34 Provinsi						
	3.	Jumlah Kebijakan Inovasi Daerah	1 PP						
1280	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH			3,942,736					3,942,736
	1.	Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan hasil kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, dan pengoperasian) Puslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diseminarkan, dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan	Tersusunnya rekomendasi perumusan kebijakan hasil kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, dan pengoperasian) Pusat Pembangunan dan Keuangan Daerah 8 Rekomendasi	2,900,000					2,900,000
	1.1	Pelaksanaan Kegiatan Kelitbangan Lingkup Pembangunan dan Keuangan Daerah	4 Rekomendasi	2,000,000					2,000,000
	1.2	Pengkajian Aktual dan Kajian Kompetitif	4 Rekomendasi	900,000					900,000
	2.	Jumlah hasil Forum Diskusi Aktual (FDA) Pembangunan dan Keuangan Daerah yang direkomendasikan untuk ditindaklanjuti	Tersedianya rekomendasi hasil Forum Diskusi Aktual (FDA) dalam rangka memecahkan permasalahan Pembangunan dan Keuangan Daerah	540,000					540,000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN			OUTCOME/OUTPUT/ TARGET/SASARAN	NON OPERASIONAL					TOTAL
					RUPIAH MURNI		PHLN		PNBP	
					PUSAT	DAERAH	PUSAT	DAERAH		
1	2			3	5	6	7	8	9	10
		2.1	Forum Diskusi Aktual (FDA) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	Tersedianya rekomendasi hasil diskusi aktual bidang pemerintahan dan pembangunan daerah yang direkomendasikan untuk ditindaklanjuti 4 rekomendasi	180,000					180,000
		2.2	Forum Diskusi Aktual (FDA) Bidang Keuangan Daerah	Tersedianya rekomendasi hasil diskusi aktual bidang keuangan daerah yang direkomendasikan untuk ditindaklanjuti 4 rekomendasi	180,000					180,000
		2.3	Forum Diskusi Aktual (FDA) Bidang Ekonomi Daerah	Tersedianya rekomendasi hasil diskusi aktual bidang ekonomi daerah yang direkomendasikan untuk ditindaklanjuti 4 rekomendasi	180,000					180,000
	3.	Jumlah Pembinaan kelitbangan (asistensi, koordinasi, fasilitasi, NSPK kelitbangan, peningkatan kapasitas, monitoring dan evaluasi) pusat dan daerah Puslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah		Tercapainya kegiatan pembinaan kelitbangan dalam rangka kelancaran pelaksanaan kelitbangan pusat dan daerah Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah 4 Laporan	502,736					502,736
		3.1	Fasilitasi Pengendali Mutu Kelitbangan	1 Laporan	322,736					322,736
		3.2	Fasilitasi Penyusunan dan Pelaksanaan Program dan Anggaran Kelitbangan Lingkup Pembangunan dan Keuangan Daerah	3 Laporan	180,000					180,000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN		OUTCOME/OUTPUT/ TARGET/SASARAN	NON OPERASIONAL					TOTAL
				RUPIAH MURNI		PHLN		PNBP	
				PUSAT	DAERAH	PUSAT	DAERAH		
1	2		3	5	6	7	8	9	10
1281	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH, POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM			3,942,736					3,942,736
1.	Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan hasil kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, dan pengoperasian) Puslitbang Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum yang diseminarkan, dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan		Tersusunnya rekomendasi perumusan kebijakan hasil kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, dan pengoperasian) Pusat Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum 8 Rekomendasi	2,900,000					2,900,000
1.1	Pelaksanaan Kegiatan Kelitbangan Lingkup Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum		4 Rekomendasi	2,000,000					2,000,000
1.2	Pengkajian Aktual dan Kajian Kompetitif		4 Rekomendasi	900,000					900,000
2.	Jumlah hasil Forum Diskusi Aktual (FDA) Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum yang direkomendasikan untuk ditindaklanjuti		Tersedianya rekomendasi hasil Forum Diskusi Aktual (FDA) dalam rangka memecahkan permasalahan Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum 12 Rekomendasi FDA	540,000					540,000
2.1	Forum Diskusi Aktual (FDA) Bidang Otonomi Daerah		Tersedianya rekomendasi hasil diskusi aktual bidang Otonomi Daerah yang direkomendasikan untuk ditindaklanjuti 4 rekomendasi	180,000					180,000
2.2	Forum Diskusi Aktual (FDA) Bidang Politik		Tersedianya rekomendasi hasil diskusi aktual bidang Politik yang direkomendasikan untuk ditindaklanjuti 4 rekomendasi	180,000					180,000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN			OUTCOME/OUTPUT/ TARGET/SASARAN	NON OPERASIONAL					TOTAL
					RUPIAH MURNI		PHLN		PNBP	
					PUSAT	DAERAH	PUSAT	DAERAH		
1	2			3	5	6	7	8	9	10
		2.3	Forum Diskusi Aktual (FDA) Bidang Pemerintahan Umum	Tersedianya rekomendasi hasil diskusi aktual bidang Pemerintahan Umum yang direkomendasikan untuk ditindaklanjuti 4 rekomendasi	180,000					180,000
	3.	Jumlah Pembinaan kelitbangan (asistensi, koordinasi, fasilitasi, NSPK kelitbangan, peningkatan kapasitas, monitoring dan evaluasi) pusat dan daerah Puslitbang Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum		Tercapainya kegiatan pembinaan kelitbangan dalam rangka kelancaran pelaksanaan kelitbangan pusat dan daerah Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah 4 laporan	502,736					502,736
		3.1	Fasilitasi Pengendali Mutu Kelitbangan	1 Laporan	322,736					322,736
		3.2	Fasilitasi Penyusunan dan Pelaksanaan Program dan Anggaran Kelitbangan Lingkup Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum	3 Laporan	180,000					180,000
1282	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				3,942,736					3,942,736
	1.	Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan hasil kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, dan pengoperasian) Puslitbang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diseminarkan, dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan		Tersusunnya rekomendasi perumusan kebijakan hasil kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, dan pengoperasian) Pusat Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil 8 Rekomendasi	2,900,000					2,900,000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN			OUTCOME/OUTPUT/ TARGET/SASARAN	NON OPERASIONAL					TOTAL
					RUPIAH MURNI		PHLN		PNBP	
					PUSAT	DAERAH	PUSAT	DAERAH		
1	2			3	5	6	7	8	9	10
		1.1	Pelaksanaan Kegiatan Kelitbangan Lingkup Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4 Rekomendasi	2,000,000					1,620,000
		1.2	Pengkajian Aktual dan Kajian Kompetitif	4 Rekomendasi	900,000					900,000
	2.	Jumlah hasil Forum Diskusi Aktual (FDA) Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang direkomendasikan untuk ditindaklanjuti		Tersedianya rekomendasi hasil Forum Diskusi Aktual (FDA) dalam rangka memecahkan permasalahan Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil 12 Rekomendasi FDA	540,000					540,000
		2.1	Forum Diskusi Aktual (FDA) Bidang Administrasi Kewilayahan	Tersedianya rekomendasi hasil diskusi aktual bidang Administrasi Kewilayahan yang direkomendasikan untuk ditindaklanjuti 4 Rekomendasi	180,000					180,000
		2.2	Forum Diskusi Aktual (FDA) Bidang Pemerintahan Desa	Tersedianya rekomendasi hasil diskusi aktual bidang Pemerintahan Desa yang direkomendasikan untuk ditindaklanjuti 4 Rekomendasi	180,000					180,000
		2.3	Forum Diskusi Aktual (FDA) Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tersedianya rekomendasi hasil diskusi aktual bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang direkomendasikan untuk ditindaklanjuti 4 Rekomendasi	180,000					180,000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN			OUTCOME/OUTPUT/ TARGET/SASARAN	NON OPERASIONAL					TOTAL
					RUPIAH MURNI		PHLN		PNBP	
					PUSAT	DAERAH	PUSAT	DAERAH		
1	2			3	5	6	7	8	9	10
	3.	Jumlah Pembinaan kelitbangan (asistensi, koordinasi, fasilitasi, NSPK kelitbangan, peningkatan kapasitas, monitoring dan evaluasi) pusat dan daerah Puslitbang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Tercapainya kegiatan pembinaan kelitbangan dalam rangka kelancaran pelaksanaan kelitbangan pusat dan daerah Bidang Puslitbang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4 Laporan	502,736					502,736
		3.1	Fasilitasi Pengendali Mutu Kelitbangan	1 Laporan	322,736					322,736
		3.2	Fasilitasi Penyusunan Kegiatan dan Anggaran Kelitbangan lingkup Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017	3 Laporan	180,000					180,000
1283	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH DAN APARATUR				4,263,164	-				4,263,164
	1.	Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan hasil kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, dan pengoperasian) Puslitbang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diseminarkan, dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan		Tersusunnya rekomendasi perumusan kebijakan hasil kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, dan pengoperasian) Puslitbang Inovasi Daerah dan Aparatur	2,000,000					2,000,000
		1.1	Pelaksanaan Kegiatan Kelitbangan Lingkup Inovasi Daerah dan Aparatur		1,100,000					1,100,000
		1.2	Pengkajian Aktual dan Kajian Kompetitif		900,000					900,000
	2.	Jumlah daerah (provinsi/kab/kota) yang memperoleh pembinaan pelaksanaan inovasi daerah		Terfasilitasinya pembinaan terhadap daerah (provinsi/kab/kota) yang melaksanakan inovasi daerah 34 Daerah	450,000					450,000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN			OUTCOME/OUTPUT/ TARGET/SASARAN	NON OPERASIONAL					TOTAL
					RUPIAH MURNI		PHLN		PNBP	
					PUSAT	DAERAH	PUSAT	DAERAH		
1	2			3	5	6	7	8	9	10
		2.1	Pembinaan Inovasi Daerah	Terselenggaranya pembinaan inovasi daerah 34 Daerah	250,000					250,000
		2.2	Penilaian Inovasi Daerah	Tersusunnya penilaian atas pelaksanaan inovasi daerah yang diajukan oleh pemerintah daerah 34 Daerah	200,000					200,000
	3.	Jumlah Kebijakan Inovasi Daerah		Tersusunnya kebijakan inovasi daerah 1 Peraturan	1,000,000					1,000,000
		3.1	Peraturan Pemerintah (PP) tentang Inovasi Daerah	1 RPP	1,000,000					1,000,000
	4.	Jumlah Pembinaan kelitbangan (asistensi, koordinasi, fasilitasi, NSPK kelitbangan, peningkatan kapasitas, monitoring dan evaluasi) pusat dan daerah Puslitbang Inovasi Daerah dan Aparatur		Tercapainya kegiatan pembinaan kelitbangan dalam rangka kelancaran pelaksanaan kelitbangan pusat dan daerah Bidang Inovasi Daerah dan Aparatur 4 Laporan	813,164					813,164
		4.1	Fasilitasi Pengendali Mutu Kelitbangan	1 Laporan	633,164					633,164
		4.2	Fasilitasi Penyusunan Kegiatan dan Anggaran Kelitbangan Lingkup Inovasi Daerah	3 Laporan	180,000					180,000
1284	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI			Terpenuhinya dukungan pelayanan teknis dan administrasi yang berkualitas di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan	11,717,593					11,717,593

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN		OUTCOME/OUTPUT/ TARGET/SASARAN	NON OPERASIONAL					TOTAL
				RUPIAH MURNI		PHLN		PNBP	
				PUSAT	DAERAH	PUSAT	DAERAH		
1	2		3	5	6	7	8	9	10
1.	Prosentase Penyelesaian dokumen Perencanaan dan Anggaran, Pengelolaan Data dan Evaluasi Kinerja serta Kerjasama Kelitbangan, Hukum dan Perundang-undangan		Tersusunnya Dokumen perencanaan dan anggaran, dokumen pengelolaan data dan evaluasi kinerja serta kerjasama kelitbangan, hukum dan perundang-undangan 100%	3,500,000					3,500,000
	1.1	Perencanaan Program dan Anggaran	Tersusunnya dokumen perencanaan program dan anggaran BPP Tahun Anggaran 2017 yang terintegrasi 2 Dokumen Perencanaan	1,060,000					1,060,000
	1.2	Review Renstra BPP Tahun 2015-2019	Tersusunnya review Renstra BPP TA 2015-2019 1 Dokumen Perencanaan	220,000					220,000
	1.3	Fasilitasi dan Penyusunan Produk Hukum dan Perundang-Undangan Bidang Kelitbangan	Tersusunnya peraturan tentang pembinaan jabatan fungsional peneliti di lingkungan Kemendagri dan Pemda 1 Peraturan	445,000					445,000
	1.4	Fasilitasi Kerjasama Kelitbangan	Terfasilitasinya kerjasama antara BPP Kemendagri dengan pemda, lembaga pendidikan dan institusi lainnya 1 Laporan	695,000					695,000
	1.5	Monitoring dan Evaluasi Program, kegiatan dan Anggaran BPP	Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi program kegiatan dan anggaran serta pemanfaatan atas hasil kelitbangan di lingkungan BPP Kemendagri 4 Laporan	730,000					730,000
	1.6	Layanan Data, Pengelolaan Lab Data dan Website Badan Litbang	Tersedianya layanan data kelitbangan dan terlaksananya pengelolaan website Badan Litbang 2 Laporan	350,000					350,000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN		OUTCOME/OUTPUT/ TARGET/SASARAN	NON OPERASIONAL					TOTAL
				RUPIAH MURNI		PHLN		PNBP	
				PUSAT	DAERAH	PUSAT	DAERAH		
1	2		3	5	6	7	8	9	10
2	Prosentase penyelesaian Administrasi Ketatausahaan Pimpinan, Kerumahtanggaan dan Perlengkapan, serta Pengelolaan Perpustakaan, Informasi dan Dokumentasi		Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Ketatausahaan Pimpinan, Kerumahtanggaan dan Perlengkapan, serta Pengelolaan Perpustakaan, Informasi dan Dokumentasi 100%	2,925,000					2,925,000
	2.1	Pelayanan administrasi ketatausahaan pimpinan	Terlaksananya layanan administrasi ketatausahaan pimpinan 3 Laporan	440,000					440,000
	2.2	Pelayanan administrasi kerumahtanggaan dan perlengkapan	Terlaksananya layanan administrasi kerumahtanggaan dan perlengkapan 4 Laporan	1,040,000					1,040,000
	2.3	Pelayanan perpustakaan, Informasi, Publikasi dan Dokumentasi Kelitbangan	Terselesaikannya administrasi pengelolaan perpustakaan, informasi dan dokumentasi 4 Laporan	1,445,000					1,445,000
3.	Prosentase penyelesaian Administrasi Verifikasi, Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu		Terselesaikannya administrasi verifikasi, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu 100%	1,858,000					1,858,000
	3.1	Pelayanan dan Pembinaan Verifikasi Keuangan BPP Kemendagri TA 2015	Tersusunnya laporan verifikasi keuangan yang akuntabel dan tepat waktu 2 Laporan	610,000					610,000
	3.2	Pelayanan dan pembinaan perbendaharaan	Terwujudnya penyelesaian administrasi dan pengelolaan keuangan 2 Laporan	575,000					575,000
	3.3	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BPP	Tersusunnya Akuntansi dan Pelaporan keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu 4 Laporan	673,000					673,000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN		OUTCOME/OUTPUT/ TARGET/SASARAN	NON OPERASIONAL					TOTAL
				RUPIAH MURNI		PHLN		PNBP	
				PUSAT	DAERAH	PUSAT	DAERAH		
1	2		3	5	6	7	8	9	10
4.	Prosentase penyelesaian Pembinaan Jabatan Fungsional, Kepegawaian dan Sistem Prosedur		Terselesaikannya pembinaan jabatan fungsional, administrasi kepegawaian dan akreditasi, sistem dan prosedur serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara 100%	1,924,000					1,924,000
	4.1	Layanan Akreditasi, Pembinaan, dan Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional	Terselesaikannya pembinaan jabatan fungsional 4 Laporan	455,000					455,000
	4.2	Layanan administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian	Terselenggaranya layanan kepegawaian dan akreditasi 6 Laporan	469,000					469,000
	4.3	Fasilitasi Penerapan Sistem Prosedur dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPP Kemendagri	Terwujudnya penguatan kapasitas aparatur dan sistem prosedur kelitbangan 6 Laporan	275,000					275,000
	4.4	Rakornas Litbang Tahun 2016	1 Laporan	725,000					725,000
5.	Prosentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu		Terlaksananya pelayanan dukungan operasional kerja yang tepat waktu (12 bulan) 100%						-
	5.1	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya Gaji, Lembur, Honorarium dan Vakasi BPP dalam satu tahun anggaran (12 Bulan Layanan)						-
	5.2	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran dan terlaksanakannya pengelolaan keuangan negara (12 Bulan Layanan)						-
6.	Prosentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan		Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang tupoksi Badan Litbang 100 %	1,510,593					1,510,593

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN		OUTCOME/OUTPUT/ TARGET/SASARAN	NON OPERASIONAL					TOTAL
				RUPIAH MURNI		PHLN		PNBP	
				PUSAT	DAERAH	PUSAT	DAERAH		
1	2		3	5	6	7	8	9	10
	6.1	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Tersedianya sarana pengolah data dan komunikasi di lingkungan Badan Litbang (10 Unit)	350,000					350,000
	6.2	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Tersedianya sarana peralatan dan fasilitas perkantoran di lingkungan Badan Litbang (100 Unit)	1,160,593					1,160,593

Jakarta, Januari 2016

Plt. KEPALA BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Drs. DOMOE ABDI, M.Si
NIP. 19561030 198203 1 001